

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan andalan sumber penerimaan utama negara, yang memberikan kontribusi lebih dari 80% total penerimaan negara. Hal ini dilihat dari porsi penerimaan pajak dari APBN yang selalu meningkat disetiap tahunnya. Penerimaan negara yang bersumber dari pajak diharapkan dapat digunakan dalam pembiayaan kebutuhan negara dan dapat melakukan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat. Pembiayaan kebutuhan negara dan pembangunan nasional membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak negara melalui sejumlah pembaharuan dan penetapan sistem pemungutan pajak yang tepat.

Indonesia saat ini menganut sistem pemungutan pajak *self assesment system*, sistem ini memberikan wewenang kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri pajak mereka kepada pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi masyarakat yang lebih tinggi terhadap penerimaan pajak negara. Serta untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak yang disadari oleh pemerintah bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk itu, Pemerintah melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mengoptimalisasikan penerimaan pajak, seperti *tax amnesty*, perbaikan sistem aplikasi pajak online yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak ke kas negara. Hal ini bisa dicapai dengan adanya kerja sama

yang baik dari wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh pada aturan perpajakan. penerimaan dari sektor pajak yang disadari oleh pemerintah bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk itu, Pemerintah melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mengoptimalisasikan penerimaan pajak, seperti *tax amnesty*, perbaikan sistem aplikasi pajak online yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak ke kas negara. Dan hal ini bisa dicapai dengan adanya kerja sama yang baik dari wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh pada aturan perpajakan.

Dengan adanya pemungutan pajak secara *self assesment system*, yang diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini, memberikan celah kepada setiap wajib pajak untuk melaporkan pajak yang lebih rendah dari seharusnya. Hal ini menyebabkan timbulnya usaha untuk mengurangi pembayaran pajak secara legal yang disebut penghindaran pajak (Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati, 2014). Penghindaran pajak merupakan suatu cara yang dilaksanakan oleh wajib pajak secara aman dan legal karena cara yang dilakukan untuk menghindari pajak ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta cara atau upaya yang dilakukan cenderung memanfaatkan celah-celah (*grey area*) yang terdapat dalam undang - undang dan peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Koming & Praditasari, 2017).

Berkurangnya hutang pajak yang bersifat legal ini dapat merupakan hal yang menguntungkan bagi perusahaan. Penghindaran pajak merupakan sesuatu yang dilematis bagi pemerintah, disatu sisi diperbolehkan sepanjang masih dalam

kerangka perpajakan dan disatu sisi praktik ini merupakan hal yang tidak etis karena akan mengurangi penerimaan negara. Fenomena ini terus berlanjut sehingga menjadi perhatian dari para pihak praktisi.

(Masrullah dkk, 2018) menjelaskan penghindaran pajak di Indonesia dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang seharusnya dikenai pajak. Aktivitas penghindaran pajak dalam perusahaan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan investor dalam perusahaan. Pihak manajemen berkeinginan untuk menekan biaya pajak agar tidak menurunkan laba dalam laporan keuangan sedangkan investor tidak ingin praktik penghindaran pajak dapat mengurangi nilai perusahaan. Dalam melakukan praktik penghindaran pajak ini, manajemen perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain *corporate governance*, karakter eksekutif dan karakteristik perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016).

Oleh karena itu, pada tahun 1999 pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) untuk mencapai tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik guna mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional. Mulanya, KNKG pertama kali dibentuk sebagai respon dari krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1997/1998. Dan juga hal ini sebagai wujud perhatian khusus dari pemerintah dan investor dalam melaksanakan praktek *corporate governance* di Indonesia. Ketika konsep tersebut dijalankan dengan pengawasan yang baik dalam perusahaan, maka perusahaan tersebut juga memiliki tata kelola yang baik

termasuk salah satunya dalam hal pemenuhan kewajibannya begitupun sebaliknya.

Penelitian ini memuat penerapan *corporate governance* akan dilihat dari mekanismenya dengan proksi kepemilikan institusional, karakteristik eksekutif dan ukuran perusahaan. Komponen ini dipilih karena dinilai memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan Penentuan penghindaran Perpajakan (Dewinta & Setiawan, 2016).

(Ariawan & Setiawan, 2017), menyatakan kepemilikan institusional yang merupakan kepemilikan yang berasal dari pihak institusi, bank, asuransi, dan perusahaan investasi lainnya akan memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perusahaan dalam memonitor kinerja manajemen, karena kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

kepemilikan institusional dipilih menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak karena dengan adanya institusi lain yang mmengang saham perusahaan itu akan meningkatkan pengawasan di perusahaan tersebut. Sehingga diharapkan dapat meminimalkan upaya penghindaran pajak.

Karakter eksekutif dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan, eksekutif memiliki dua karakter, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis. Tipe ini memiliki dorongan kuat untuk memiliki posisi, kesejahteraan, kewenangan yang lebih tinggi, dan penghasilan yang lebih besar dengan bersedia menerima

konsekuensi risiko yang lebih tinggi pula (Praptidewi & Sukartha, 2016). Sedangkan eksekutif yang tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis merupakan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse*. Jika risiko perusahaan makin tinggi maka eksekutif mempunyai karakter *risk taker*, dan begitu sebaliknya (Oktamawati, 2017). Dari hasil penelitian ini, menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ini artinya semakin tinggi eksekutif memiliki karakter *risk taking*, maka semakin *tinggi* penghindaran pajak.

Karakter eksekutif dipilih dalam penelitian ini sebagai variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak selanjutnya karena apabila eksekutif bersifat *risk taker* maka tingkat penghindaran pajak akan tinggi pula. Hal ini dikarenakan adanya eksekutif yang lebih menyukai risiko dan cenderung melakukan penghindaran pajak.

(ADIWIBOWO, 2018) , menyatakan ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dibagi perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, penjualan, dan lain sebagainya). Besarnya ukuran perusahaan ditentukan oleh besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Banyak perusahaan besar yang memiliki aset besar melakukan tindakan penghindaran pajak dalam operasionalnya. Contohnya dibebberapa kasus besar penghindaran pajak sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti kasus Asian Agri, Bumi *Resources*, dan Adaro (Fitria, 2018). Fakta ini semakin menunjukkan hubungan penghindaran pajak dengan perusahaan yang memiliki aset yang besar.

(Handayani, 2018), perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Sedangkan menurut (Wijayanti & Merkusiwati, 2017), yang memiliki penelitian dengan hasil berbeda, menyatakan bahwa perilaku perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak tidak dipengaruhi besar kecilnya perusahaan.

Ukuran perusahaan dipilih menjadi variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak karena ada kasus – kasus besar yang terjadi terkait penghindaran pajak dikarenakan ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung akan berusaha untuk meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini akan menjelaskan pengaruh kepemilikan institusional, karakter eksekutif, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini berusaha untuk menunjukkan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, karakteristik eksekutif, dan ukuran perusahaan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Kepemilikan Institusional, Karakter Eksekutif, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 - 2022).**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah karakter eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Batasan Masalah

Beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak seperti ; *leverage*, komite audit, pertumbuhan penjualan, komisaris independen, kepemilikan institusional, karakter eksekutif, dan ukuran perusahaan. Tetapi dalam penelitian ini berfokus pada faktor kepemilikan institusional, karakter eksekutif, dan ukuran perusahaan. Serta dalam penelitian ini ditujukan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau nilai guna, baik dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan tentang analisis penghindaran pajak.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan wawasan dan pelajaran dalam penelitian terkait dengan pengaruh kepemilikan institusional karakteristik eksekutif, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2. Pihak akademisi

Penelitian ini dapat memberi informasi tambahan bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional, karakteristik eksekutif, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak sebagai variabel untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat menentukan pengambilan keputusan oleh investor dan dapat menilai kualitas informasi laporan keuangan perusahaan, terutama pelaporan pajak.

4. Bagi Pembaca

Diharapkan menambah ilmu pengetahuan mengenai penghindaran pajak.

5. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau masukan bagi perkembangan ilmu perpajakan dan menambah kajian tentang perpajakan khususnya tentang penghindaran pajak.

6. Bagi Pemerintah

Melalui hasil dari penelitian ini diharapkan pemerintah dapat memperbaiki peraturan perpajakan bagi perusahaan di Indonesia serta dalam pembuatan kebijakan – kebijakan yang berhubungan dengan penerimaan negara.

7. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perusahaan dalam hal pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Stakeholder* (*Stakeholders' Theory*)

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa semua pemangku kepentingan mempunyai hak untuk mendapat informasi tentang aktivitas perusahaan selama periode tertentu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Dua aspek penting dalam teori *stakeholder* adalah hak (*right*) dan akibat (*effect*). Aspek pertama yaitu hak, pada dasarnya menghendaki bahwa perusahaan dan para manajernya tidak boleh melanggar hak *stakeholder*. Aspek kedua yaitu akibat, menghendaki agar manajemen perusahaan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan.

Menurut (Lestari dkk., 2016), Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholder* nya. Teori *stakeholder* menggambarkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab dalam memaksimalkan keuntungan bagi pemilik dan investor melainkan juga bertanggung jawab dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan sosial dan pemerintah sebagai pihak eksternal berhak memperoleh informasi terkait aktivitas perusahaan.

Teori ini memberi alasan bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Governance* (CG) sebab tujuan utama teori *stakeholder* adalah untuk membantu eksekutif perusahaan melakukan pengelolaan lebih efektif dengan hubungan-

hubungan yang ada di lingkungan perusahaan mereka. Tujuan yang lebih luas perusahaan adalah membantu dalam meningkatkan nilai dari aktivitas-aktivitas mereka dan meminimalkan kerugian bagi *stakeholder*.

2.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.2.1 Pengertian penghindaran pajak

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi dari manajemen pajak dimana menurut (Puspitasari & Njit, 2022), menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya, dan bukan sebagai wajib pelanggaran pajak karena usaha pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang - undang pajak.

Ada beberapa skema dalam penghematan pajak perusahaan, terutama perusahaan multinasional, antara lain sebagai berikut :

1. Transfer Pricing

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik barang maupun jasa, berwujud atau tidak, serta transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Thin Capitalization

Thin capitalization adalah upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman agar dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba.

3. *Treaty Shopping*

Treaty shopping adalah praktik yang dilakukan oleh wajib pajak suatu negara yang tidak melakukan *tax treaty* (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/P3B) dan mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki *tax treaty*, kemudian melakukan investasi melalui anak perusahaan.

4. *Controlled Foreign Corporation (CFC)*

Controlled foreign corporation (CFC) adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri yang berada di negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali (*tax heaven country*) yang dibentuk dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak.

Penghindaran pajak sengaja dilakukan perusahaan untuk memperkecil beban pajak yang perlu dibayarkan dengan meningkatkan *cash flow* perusahaan.

2.2.2 Pengukuran penghindaran pajak

Dalam penelitian ini, proksi yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak adalah *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. CETR diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Purwanto dkk., 2016).

Semakin besar nilai CETR mengindikasikan bahwa *semakin* rendah tingkat penghindaran pajak. Rasio CETR diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.3 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

2.3.1 Pengertian Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip - prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Sehingga sistem tersebut diharapkan dapat memonitor dan melakukan pengawasan di perusahaan.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), Tata kelola Perusahaan adalah sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan.

Kehadiran Tata kelola Perusahaan yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional, selain itu mekanisme pelaksanaannya juga harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme Tata kelola Perusahaan yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu kepemilikan institusional, karakter eksekutif, dan ukuran perusahaan.

2.3.2 Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dalam penelitian ini dilihat dari kepemilikan institusional, karakter eksekutif, ukuran perusahaan.

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank, kecuali kepemilikan individual investor (Damayanti & Susanto, 2016). Pemilik saham institusional memiliki peran yang penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Institusi sebagai pemilik saham juga dianggap mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi.

Kepemilikan institusional yang tinggi atas saham suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik dari para manajer perusahaan. Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut. Pengukuran ini juga dilakukan pada penelitian (Yudistira dkk., 2021). Adapun cara mengukur kepemilikan institusional yaitu :

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Jumlah saham keseluruhan}}$$

2. Karakter Eksekutif

Setiap perusahaan memiliki seorang pemimpin yang menduduki posisi teratas baik sebagai *top* eksekutif maupun *top* manajer, dimana setiap pimpinan memiliki karakter - karakter tertentu untuk memberikan arahan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan (Butje & Tjondro, 2014). Setiap individu pimpinan perusahaan sebagai eksekutif memiliki dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berani mengambil resiko dalam berbisnis karena adanya paham bahwa semakin tinggi resiko yang diambil akan semakin tinggi keuntungan yang diperoleh.

Kebalikan dari *risk taker*, eksekutif yang bersifat *risk averse* akan lebih memilih untuk menghindari segala bentuk kesempatan yang berpotensi menimbulkan resiko dan lebih suka menahan sebagian besar aset yang dimiliki dalam investasi yang relatif aman untuk menghindari pendanaan dari utang, ketidakpastian jumlah return dan sebagainya. Cara mengukur Karakter Eksekutif yaitu :

$$\text{Karakter Eksekutif} = \frac{\text{Standar Deviasi EBITDA}}{\text{Total Aset}}$$

$$\text{Standar Deviasi} = \sqrt{\frac{\sum x_n(x_1 - \widehat{x})^2}{n - 1}}$$

3. Ukuran Perusahaan (*Size Firm*)

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki (Ardyansah, 2014). Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*),

perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*).

Klasifikasi ukuran perusahaan dapat dilihat dengan berbagai nilai antarlain dengan total tenaga kerja, aset, dan penjualan. Klarifikasi ukuran perusahaan menurut (Pemerintah Indonesia, 2021) dalam PP No.7 tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1 dibagi dalam 4 kateori yaitu

- 1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.**
- 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.**
- 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.**
- 4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.**

Pada penelitian ini, ukuran perusahaan dilihat dari besarnya total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Pengukuran dengan menggunakan total aset digunakan dengan alasan pengukuran dengan total aset dianggap lebih baik dan stabil jika dibandingkan dengan pengukuran menggunakan total penjualan

ataupun nilai pasar saham. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan. Cara mengukur ukuran perusahaan yaitu :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{nilai total aset})$$

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kepemilikan institusional , karakter eksekutif, ukuran perusahaan dan penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu menjelaskan yang hasil penelitian oleh peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh peneliti, seperti (Oktamawati, 2017) yang berjudul “ Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*” semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014”. Hasil penelitian adalah karakter eksekutif, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian juga dilakukan oleh (Masrullah dkk, 2018) dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, *Leverage*, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016”. Variabel independen yang

digunakan adalah Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, *Leverage*, dan *Sales Growth*, sedangkan variabel dependennya menggunakan CETR sebagai proksi *Tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel *leverage* dan *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian juga dilakukan oleh (Fitria, 2018) dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Karakter Eksekutif, dan *Size* Terhadap *Tax Avoidance* Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017”. Variabel independen yang digunakan adalah Kepemilikan Institusional, Karakter Eksekutif, *Leverage*, dan *Size*, sedangkan variabel dependennya menggunakan *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional, karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Penelitian juga dilakukan oleh (Prashant Bhushan, 2012) dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur. Variabel independen yang digunakan adalah *Corporate Governance*, Profitabilitas, *Leverage*, dan Karakteristik Eksekutif, sedangkan variabel dependennya menggunakan *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif, sedangkan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian juga dilakukan oleh (SIAHAAN, 2015) dengan judul “*Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. Variabel independen yang digunakan adalah *Karakter Eksekutif, dan Corporate Governance*, sedangkan variabel dependennya menggunakan penghindaran pajak.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko perusahaan, komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Penelitian mengenai penghindaran pajak yang telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya digunakan oleh penulis sebagai referensi. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan penulis dirangkum dalam tabel berikut :

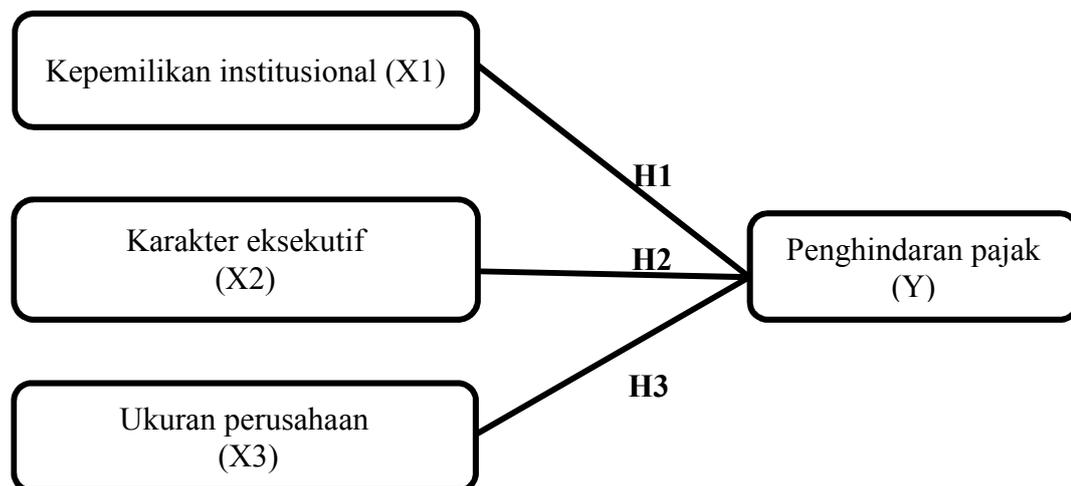
Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Oktamawati , 2017)	“Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ” semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014,	Karakter Eksekutif, (X_1), Komite Audit (X_2), Ukuran Perusahaan (X_3), <i>Leverage</i> , (X_4), Pertumbuhan Penjualan (X_5), Profitabilitas (X_6), <i>Tax Avoidance</i> (Y)	karakter eksekutif, ukuran perusahaan <i>leverage</i> , pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	(Masrullah dkk, 2018)	“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax</i>	Kepemilikan Institusional (X_1) Komisaris Independen, (X_2), <i>Leverage</i> (X_3), <i>Sales Growth</i> (X_4), <i>Tax Avoidance</i> (Y)	kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan

		<i>Avoidance</i> Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016”,		terhadap <i>tax avoidance</i>
3	(Fitria, 2018)	“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Karakter Eksekutif, dan <i>Size</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017,	Kepemilikan Institusional (X_1) Karakter Eksekutif, (X_2), <i>Size</i> (X_3), <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Kepemilikan Institusional, karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	(Prashant Bhushan, 2012)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Manufaktur	<i>Corporate Governance</i> (X_1) Profitabilitas (X_2), Karakteristik Eksekutif (X_3), <i>Tax Avoidance</i> (Y)	ROA berpengaruh negatif, sedangkan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	(SIAHAAN, 2015)	<i>Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)</i>	Karakter Eksekutif (X_1) <i>Corporate Governance</i> (X_2), Penghindaran Pajak (Y)	risiko perusahaan, komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menguji kepemilikan konstitusional, karakteristik eksekutif dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak perusahaan yang diukur dengan proksi CETR, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan konstitusional, karakteristik eksekutif dan ukuran perusahaan. Keterkaitan antar variabel dinyatakan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.6 Hipotesis Penelitian

2.6.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan teori *stakeholder*, kepentingan antara pemegang saham harus diperhatikan. Manajer tentunya ingin mendapatkan keuntungan dan insentif atas kinerjanya sedangkan pemegang saham ingin kesejahteraannya terjamin. Maka perbedaan kepentingan tersebut perlu diselaraskan dengan kepemilikan insitusional. Pihak institusi memiliki fungsi pengawasan terhadap manajer agar tidak bertindak opportunistik. Pihak institusi dapat menekan manajer untuk memperhatikan kejahteraan para investor, sehingga pihak intitusi akan memaksa manajer agar lebih konservatif dalam mengambil suatu keputusan. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.6.2 Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap penghindaran pajak

Perusahaan pasti memiliki sosok individu yang bertugas sebagai pemimpin. Pemimpin tersebut biasanya menjabat sebagai eksekutif di perusahaan. Eksekutif sendiri memiliki dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berani dalam mengambil sebuah resiko dalam bisnisnya. Karena eksekutif tersebut mempunyai pemahaman terkait semakin tinggi resiko maka akan semakin tinggi pula keuntunganya. Berbeda dengan eksekutif yang memiliki karakter sebagai *risk averse* akan lebih memilih untuk

menghindari segala macam peluang yang berpotensi menimbulkan resiko dan lebih suka menahan sebagian besar aset yang dimiliki perusahaan dalam investasi yang relatif aman. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.6.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya dinilai dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut, semakin besar aset yang dimiliki diharapkan semakin meningkatkan produktifitas perusahaan. Peningkatan produktifitas akan menghasilkan laba yang semakin besar dan tentunya mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. Dari uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan serta meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel yang menyebabkan timbulnya penghindaran pajak yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Peneliti menggunakan metode deskriptif untuk melihat sebab-akibat antara variabel bebas (kepemilikan institusional, karakter eksekutif, dan ukuran perusahaan) dengan variabel terikat (penghindaran pajak).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei eksplanasi (*explanatory survey*). Metode survei eksplanasi merupakan metode penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data yang diambil dari sampel dari populasi tersebut, sehingga ditemukan deskripsi dan hubungan-hubungan antar variabel.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan dalam laporan keuangan perusahaan perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020-2022 yang berjumlah 44 perusahaan.

3.2.2 Sampel

(Ninoy Yudhistya Sulistiyono, 2013), menyatakan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel dalam populasi ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan melalui pengambilan sampel dengan berdasarkan kriteria - kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020 - 2022.
2. Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang mempublikasikan laporan keuangan pada BEI selama tahun 2020 - 2022 secara berturut-turut.
3. Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2020 – 2022.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 25 perusahaan dengan periode penelitian 3 tahun, yaitu tahun 2020 - 2022. Dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Daftar Sampel Penelitian

No	Emiten	Nama Perusahaan
1	BOBA	PT. Formosa Ingredient Factory Tbk
2	BUDI	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk
3	CAMP	PT. Campina Ice Cream Industry Tbk
4	CLEO	PT. Sariguna Primatirta Tbk
5	CMRY	PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk
6	COCO	PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk
7	DLTA	PT. Delta Djakarta Tbk
8	DMND	PT. Diamond Food Indonesia Tbk
9	ENZO	PT. Morenzo Abadi Perkasa Tbk
10	GOOD	PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
11	HOKI	PT. Buyung Poetra Sembada Tbk
12	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
13	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
14	KEJU	PT. Mulia Boga Raya Tbk
15	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
16	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk
17	PANI	PT. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk
18	PMMP	PT. Panca Mitra Multiperdana Tbk
19	PSGO	PT. Palma Serasih Tbk
20	ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
21	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk
22	SKLT	PT. Sekar Laut Tbk
23	STTP	PT. Siantar Top Tbk
24	TAYS	PT. Jaya Swarasa Agung Tbk
25	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk

Sumber : www.idx.co.id

3.3 Data dan teknik pengumpulan data

3.3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah penelitian dimana data yang diperoleh dari dokumen laporan keuangan yang berisi angka - angka.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut (Ninoy Yudhistya Sulistiyono, 2013), menjelaskan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2022.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui *website* resmi yaitu www.idx.co.id, seperti laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 - 2022.

3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran dari masing - masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator yang membentuknya. Dengan adanya definisi operasional pada variabel yang dipilih dan digunakan pada penelitian maka lebih mudah untuk diukur. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Variabel independen yaitu kepemilikan institusional, karakteristik eksekutif, dan ukuran perusahaan.

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang diteliti pada penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi dari manajemen pajak dimana menurut (Yantri, 2022), menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya, dan bukan sebagai pelanggaran pajak karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *cash effective tax rate*, rasio ini dihitung dengan rumus :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.4.2 Variabel Independen

Menurut (Saptutyningasih dan setyaningrum, 2019) variabel independen sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

1) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank (Damayanti & Susanto, 2016). Sehingga akan ada kontrol yang lebih baik dalam mengawasi kinerja manajemen. Variabel kepemilikan institusional diukur dengan membandingkan saham yang dimiliki institusi dan jumlah saham keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan. Kepemilikan institusional menggunakan unit pengukuran dalam satuan desimal. Kepemilikan institusional dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Jumlah saham keseluruhan}}$$

2) Karakter Eksekutif

Pemimpin perusahaan mempunyai karakter yang berbeda dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan dalam perusahaan.(Ervaniti dkk., 2020) (Meilia & Adnan, 2017). Untuk mengetahui karakter eksekutif maka digunakan risiko yang dimiliki oleh perusahaan. Risiko perusahaan diukur menggunakan standar deviasi EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total aktiva perusahaan (Oktamawati, 2017).

$$\text{Karakter Eksekutif} = \frac{\text{Standar Deviasi EBITDA}}{\text{Total Aset}}$$

$$\text{Standar Deviasi} = \sqrt{\frac{\sum x_n(x_1 - \widehat{x})^2}{n - 1}}$$

Ket. : EBITDA = *Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*

3) Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yang diukur dari total aset akan ditransformasikan dalam bentuk logaritma dengan tujuan untuk menyamakan dengan variabel lain, karena nilai total aset perusahaan relatif lebih besar dibandingkan dengan variabel - variabel lain dalam penelitian ini. Pengukuran ini digunakan sebagai indikator karena dianggap mampu menggambarkan ukuran suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{nilai total aset})$$

Ket. : Ln = *Logaritma Natural*

3.5 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Untuk menganalisis penelitian ini untuk menguji apakah kepemilikan institusional, karakteristik eksekutif, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, maka metode analisis data dilakukan dengan metode statistik menggunakan *Statistic Program and Service Solution (SPSS)* .

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara ringkas variabel-variabel dalam penelitian ini melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa kepemilikan institusional, karakter eksekutif dan ukuran perusahaan dengan variabel dependen berupa penghindaran pajak.

Sehingga penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda, untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, diperlukan uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk menjabarkan nilai maksimum, rata - rata dan standar deviasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam pengujian data.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hasil regresi linear berganda yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini terbebas dari penyimpangan. Adapun pengujian asumsi klasik sebagai berikut : uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedasitas dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data adalah teknik pembangunan persamaan garis lurus untuk membuat penafsiran agar penafsiran tersebut tepat maka persamaan yang digunakan untuk menafsirkan juga harus tepat. Tujuan uji normalitas data adalah untuk mengetahui apakah analisis antara variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data dapat melalui uji *kolmogorov smirnov*, untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan dalam penelitian ini. Dasar pengambilan keputusan adalah jika signifikannya:

Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal

Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Dalam model regresi yang baik, seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Cara mendeteksi keberadaan multikolinieritas dalam model regresi penelitian ini yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas.
2. Jika nilai *tolerance* tidak mendekati angka 1 dan nilai VIF diatas 10, maka terjadi masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat diartikan sebagai uji untuk mendapatkan informasi keadaan dimana ada perbedaan varian. Pengujian heterokedasitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode uji *Scatter Plot*. Dasar pengambilan keputusan pada uji heterokedastisitas yaitu:

1. Apabila terdapat titik-titik yang membentuk pola tertentu secara teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas.
2. Apabila tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji statistik Durbin Watson (DW).

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi dan model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya adalah *time series* atau berdasarkan waktu berkala. Kriteria pengambilan keputusannya adalah :

- a. Jika $0 < dw < dL$, berarti ada autokorelasi positif
- b. Jika $4 - dL < dw < 4$, berarti ada autokorelasi negatif
- c. Jika $dU < dw < 4 - dU$, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif
- d. Jika $dL \leq dw \leq dU$ atau $4 - dU \leq dw \leq 4 - dL$, pengujian tidak meyakinkan.

3.5.3 Analisis regresi linear berganda

Regresi linear berganda adalah regresi dimana variabel terikatnya (Y) dihubungkan lebih dari satu variabel bebas (X) dan masih tetap menunjukkan diagram hubungan lurus atau linear. Tujuan analisis linear berganda adalah untuk

menganalisis hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Penghindaran pajak
 α = Konstanta
 β_{1-3} = Koefisien regresi
 X_1 = Kepemilikan institusional
 X_2 = Karakter eksekutif
 X_3 = Ukuran perusahaan
 e = *Error*

3.6 Pengujian Hipotesis

Selanjutnya setelah melakukan uji asumsi klasik, peneliti melakukan pembuktian dengan hipotesis diterima atau ditolak maka dilakukan pengujian hipotesis yang terdiri dari yaitu :

a. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t melakukan pengujian terhadap koefisien secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Uji t dilakukan dengan tingkat signifikan 5% .
 Kriteria penerimaan sebagai berikut:

H0 : jika nilai signifikan $< 0,05$ atau $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka dapat dikatakan antar variabel terdapat pengaruh secara parsial.

H1 : jika nilai signifikan $> 0,05$ atau $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka tidak ada pengaruh antar dua variabel secara parsial.

b. Uji koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila koefisien determinasi (R^2) = 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sebaliknya untuk koefisien determinasi (R^2) = 1 maka variabel independen berpengaruh kuat terhadap variabel dependen.

Kepemilikan institusional (X1)